

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung;
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. Ketiga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta;
- Fuady, Munir dan Fuady Sylvia Laura L., 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta;
- Huda, Chairul, 2015, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Prenadamedia, Jakarta;
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga;
- _____, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, 2012, Penerbit Erlangga, Jakarta;
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- _____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Hatta, H. Moh., 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Tanya Jawab (Dilengkapi Undang-undang Terkait)*, Liberty, Yogyakarta;
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hamzah, Andi, Sri Mulyani, Liberty, Djami Rusti Djamaan, Firman Wijaya, Ahmad Ubbe, Alim Wardoyo, Ellyna Syukur, , 2007, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Batas Waktu Penyerahan Berkas Perkara Dari Penyidik Ke Penuntut Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta;
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidan Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ketigabelas, Sinar Grafika, Jakarta;

- Istanto, Sugeng F., 2004, "Penelitian Hukum", Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Karianga, Hendra, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta;
- Lamintang, P.A.F dan lamintang Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Marwan, M. dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Pub-lisher, Surabaya;
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua, cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta;
- Marzuki, Mahmud Peter, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta;
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung;
- MD. Mahfud Moh., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. Revisi, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta;
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.IX, Rineka Cipta, Jakarta;
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta;
- _____, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta;
- Prodjodikoro, Wirjono, 1990, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung;
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah Halim Abdul, 2012, Cet. III, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Yogyakarta;
- Qomar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta;

- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Rahardjo, Satjipto, 2014, Cetakan kedelapan, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Samosir, C. Djisman, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung;
- Sahetapy, J. E., 2009, *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta;
- Salam, Moch. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Madju, Bandung;
- _____, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- Soetana, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung;
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara Pidana Indonesai Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, Bogor;
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd., 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta;
- Salim, H. dan Nurbani Septiana Erlies, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok;
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Simanulang, Robin CH., 2014, “*Biografi Hukum Romli Atmasasmita Jalan Keadilan di Tengah Kezaliman*”, Pustaka Tokoh Indonesia, Jakarta;
- Subketi, R., 2010, *Hukum Pembuktian*, cetakan kedelapanbelas, Pradnya Paramita, Jakarta;

Suharto dan Efendi Jonaedi, 2014, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta;

Soeparmono, R., 2015, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung;

Taufiq, Muhammad, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum Belajar dari Kasus Lanjar*, MT&P Law Firm, Surakarta;

Waluyo, Bambang, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, cet. Keempat, Jakarta;

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 *Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Lembaran Negara tahun 1951 Nomor: 9. Tambahan Lembaran Negara Nomor 81*;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan pada tanggal 17 Desember 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor: 74*;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3258*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan, Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614*;

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Militer. Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor: 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3713;*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3879;*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia. Diundangkan pada tanggal 23 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3886;*

Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 *Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Diundangkan pada tanggal 23 November 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor: 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4026;*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4250;*

Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 *Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Diundangkan pada tanggal 4 April 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4284;*

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan tanggal 15 Januari 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4358;*

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5062;*

UU Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman. Diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum. Diundangkan pada tanggal 2 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5248;*

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5332;*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Diundangkan pada tanggal 1 Agustus Tahun 1983, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3258;*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tanggal 19 April 2016, diundangkan pada tanggal 20 April 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596;*

Peraturan Kapolri Nomor: 12 Tahun 2009 *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 Oktober 2009. Diundangkan pada tanggal 13 November 2009, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 429;*

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Risalah, Karya Ilmiah, Internet, Surat Kabar

Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2001. *Risalah Rapat Persidangan I, Rapat Paripurna Terbuka Ke-5. Pembicaraan Tingkat I (Keterangan Pemerintah) Atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor: 3235/Risalah/79;*

Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2001. *Risalah Rapat Persidangan II, Rapat Paripurna Terbuka Ke-9. Pembicaraan Tingkat II (Pemandangan Umum Para Anggota) Atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor: 3540/Risalah/79;*

Bidang Arsip dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2001. Masa Persidangan I, Rapat Paripurna Terbuka Ke-5. Tahun sidang 1981-1982, *Pembicaraan Tingkat IV (Kata Akhir Fraksi-fraksi serta Pengambilan Keputusan) Atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Risalah Nomor: 2286/Risalah/81.05;*

Simarmata, Berlian, 2012, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa Dalam Penahanan”*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Baryanto, 2011, *“Rekayasa Pengumpulan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Kelompok Bidang Hukum Pidana, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Situmorang, Yusuf Beni, 2016, *“Penetapan Status Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Indonesia Corruption Watch, [http:// www.antikorupsi.org/id/content/denny-indrayana-tersangka-puncak-pembangkangan-dan-kriminalisasi-kepolisian](http://www.antikorupsi.org/id/content/denny-indrayana-tersangka-puncak-pembangkangan-dan-kriminalisasi-kepolisian), tanggal 29 September 2017;

Septina, Ayu Handayani, *Pandangan Monistis dan Dualistis Hukum Pidana*, aurockefeller.Blogspot.co.id/2012/04/pandangan-monistis-dan-dualistis-hukum.html;

[www. mahkamahkonstitusi.or.id.;](http://www.mahkamahkonstitusi.or.id.)

Harian Kompas, 11 November 2015, *Batas Waktu Penetapan Status Tersangka Diuji*, Kilas Politik dan Hukum;

D. Putusan Pengadilan/Mahkamah Konstitusi:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014;



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PENETAPAN TERSANGKA TANPA BATAS WAKTU DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

EDUARDUS W. GUNUNG, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015, tanggal 25 Agustus
2016.